

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menghadapi tantangan dalam mempertanggungjawabkan wewenang yang diserahkan, pemerintah diperlukan dalam membangun serta mengelola wilayah dengan efektif. Pemahaman pemerintah daerah terhadap kebutuhan dan kondisi lokal lebih baik karena mereka lebih dekat dengan masyarakat yang mereka layani, sehingga kebijakan dan program yang diimplementasikan cenderung lebih sesuai dengan realitas yang ada. Pemerintah daerah memiliki keunggulan geografis karena letaknya yang dekat dengan masyarakat. Hal ini memungkinkan untuk memahami kondisi dan kebutuhan masyarakatnya dengan lebih baik. Pemahaman ini penting dalam menyusun kebijakan dan program yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Menurut Halim (2008), Otonomi daerah didefinisikan seperti kebebasan dan otoritas yang diberi kepada daerah untuk bertanggung jawab secara mandiri atas kepentingan masyarakatnya. Hal ini dilakukan berdasarkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dengan mengikuti peraturan yang berlaku.

Kemampuan pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi tercermin dari kemampuannya dalam mengelola keuangan. Oleh karena itu, diperlukan pengukuran kinerja pemerintah daerah. Salah satu cara untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah yang diatur dalam APBD yaitu dengan menggunakan analisis rasio keuangan (Halim, 2008). Mahsun (2016) menyatakan bahwa pengukuran kinerja memiliki tujuan untuk memahami seberapa efektif tujuan pemerintah daerah dapat dicapai dan untuk membantu kegiatan manajemen pemerintah daerah. Halim (2002) juga mengidentifikasi berbagai metode pengukuran keuangan, seperti rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas dan efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian belanja, dan sebagainya. Hasil evaluasi rasio keuangan tersebut kemudian dipakai sebagai standar:

- 1) Mengevaluasi kemampuan keuangan daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah.
- 2) Mengevaluasi seberapa efektif dan efisien pelaksanaan penerimaan daerah.

- 3) Menilai seberapa efektif kegiatan pemerintah daerah menggunakan pendapatan daerahnya.
- 4) Mengevaluasi kontribusi masing-masing sumber pendapatan terhadap pembentukan pendapatan daerah.
- 5) Memeriksa apakah perolehan dan pengeluaran telah meningkat atau menurun selama periode waktu tertentu.

Perbedaan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer pemerintah pusat memberikan gambaran yang jelas tentang tingkat kemandirian keuangan suatu daerah. Di dalam analisis ini, rasio kemandirian memainkan peran krusial dalam mengevaluasi sejauh mana suatu daerah tergantung pada dana eksternal dan sejauh mana masyarakatnya terlibat dalam proses pembangunan lokal (Halim, 2008). Kemandirian keuangan sebuah daerah bukan hanya sekadar indikator jumlah dana yang dihasilkan secara internal, tetapi juga refleksi dari kebijakan dan strategi pembangunan yang dijalankan. Saat pendapatan asli daerah (PAD) meningkat, sementara proporsi pendapatan dari sumber eksternal menurun, itu menandakan kemajuan dalam upaya kemandirian keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa daerah tersebut mampu mengelola sumber daya dan potensi lokalnya dengan efektif, tanpa terlalu banyak mengandalkan dana dari pemerintah pusat atau pinjaman luar.

Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin besar tanggung jawab dan peran aktif masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan potensi lokal mereka. Ini menciptakan landasan yang kuat untuk pertumbuhan berkelanjutan dan pemberdayaan ekonomi lokal, karena masyarakat menjadi lebih terlibat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi masa depan daerah mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa tingkat kemandirian keuangan bukanlah tujuan akhir, tetapi alat untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Terkadang, daerah dengan kemandirian keuangan yang tinggi juga membutuhkan bantuan eksternal atau pinjaman untuk proyek-proyek infrastruktur besar atau program-program pengembangan tertentu. Oleh karena itu, pengelolaan

kemandirian keuangan haruslah seimbang, mempertimbangkan kebutuhan dan potensi masyarakat setempat sambil tetap memastikan keberlanjutan dan stabilitas finansial jangka panjang.

Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi di Pulau Sumatera, Indonesia yang memilih untuk menerapkan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD, 2022). Undang-undang ini merupakan sinergi fiskal yang bertujuan untuk menyelaraskan tindakan pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional secara efektif dan efisien serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Terdapat empat pilar utama yang menjadi dasar lahirnya UU HKPD, yaitu: a) pengurangan ketimpangan vertical dan horizontal, b) penguatan kewenangan pemungutan pajak daerah, c) peningkatan kualitas belanja daerah, d) harmonisasi belanja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Provinsi Jambi mempunyai potensi sumber daya alam yang cukup besar, khususnya disektor pertanian.

Di sisi lain, Provinsi Jambi memiliki letak strategis di kawasan segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT) dan sangat dekat dengan Selat Malaka (80 mil) (Zevaya et al., 2022). Menurut direktorat jenderal perimbangan keuangan (2023) pendapatan transfer masih memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar Rp13.321,68 miliar atau sekitar 75% dari total pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan pemerintah pusat melalui transfer pendapatan masih menjadi faktor dominan pendanaan di Provinsi Jambi.

Saat ini Provinsi Jambi merupakan provinsi dengan perkembangan paling pesat di Pulau Sumatera. Berdasarkan data analisis daya saing provinsi di Indonesia yang dilakukan *Asian Competitiveness Institute* (2020), Provinsi Jambi menempati peringkat kelima dari sepuluh provinsi di Pulau Sumatera. Oleh karena itu, pergerakan perekonomian dan kegiatan aglomerasi di Provinsi Jambi mengalami perkembangan yang signifikan. Namun, Provinsi Jambi masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Berikut disajikan data jumlah PAD di setiap kab/kota di Provinsi Jambi tahun 2019-2023 pada tabel 1.1 dan jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat di setiap kab/kota di Provinsi Jambi tahun 2019-2023 pada tabel 1.2:

**Tabel 1. 1 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Kab/Kota di Provinsi Jambi
Tahun 2019- 2023 (Miliar Rupiah)**

Kabupaten / Kota	Jumlah Pendapatan Asli Daerah					Rata- rata
	2019	2020	2021	2022	2023	
Batanghari	91,57	104,23	148,44	107,14	138,69	118,01
Pertumbuhan (%)		13,83	42,42	-27,82	29,45	14,47
Bungo	140,33	126,13	198,75	130,12	149,31	148,93
Pertumbuhan (%)		-10,12	57,58	-34,53	14,75	6,92
Kerinci	85,90	81,67	66,89	36,71	50,20	64,27
Pertumbuhan (%)		-4,92	-18,10	-45,12	36,75	-7,85
Merangin	106,16	100,32	107,88	105,43	94,16	102,79
Pertumbuhan (%)		-5,50	7,54	-2,27	-10,69	-2,73
Muaro Jambi	93,79	92,80	110,75	108,27	121,29	105,38
Pertumbuhan (%)		-1,06	19,34	-2,24	12,03	7,02
Sarolangun	94,62	70,10	63,59	62,62	62,70	70,73
Pertumbuhan (%)		-25,91	-9,29	-1,53	0,13	-9,15
Tjb. Barat	120,22	115,56	118,53	130,48	117,13	120,38
Pertumbuhan (%)		-3,88	2,57	10,08	-10,23	-0,36
Tjb. Timur	53,92	49,65	81,60	52,84	57,23	59,05
Pertumbuhan (%)		-7,92	64,35	-35,25	8,31	7,37
Tebo	83,24	78,46	92,92	79,14	61,29	79,01
Pertumbuhan (%)		-5,74	18,43	-14,83	-22,55	-6,17
Kota Jambi	393,43	355,67	384,73	436,89	436,01	401,35
Pertumbuhan (%)		-9,60	8,17	13,56	-0,20	2,98
Kota Sei. Penuh	34,90	29,05	59,11	66,15	69,85	51,81
Pertumbuhan (%)		-16,76	103,48	11,91	5,59	26,05

Sumber: DJPK Kemenkeu RI (Data diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa realisasi PAD di kabupaten/kota Provinsi Jambi selama tahun 2019-2023 mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi. Untuk rata-rata pertumbuhan realisasi PAD terendah yaitu terjadi di Kabupaten Sarolangun sebesar -9,15%, hal ini dikarenakan masih banyak potensi pajak yang belum tergali dan pemungutan pajak serta retribusi masih belum optimal. Rata-rata pertumbuhan realisasi PAD tertinggi terjadi pada Kota Sungai

Penuh sebesar 26,05%. Tingginya pertumbuhan PAD tersebut dikarenakan terjadinya peningkatan PAD pada tahun 2021. Selain itu, pemerintah Kota Sungai Penuh terus berupaya meningkatkan realisasi dan mengoptimalkan sektor penerimaan yang bisa dipungut sebab melihat realisasi PAD sangat rendah jika dibandingkan dengan daerah lainnya.

Kota Jambi merupakan kota yang memiliki jumlah rata-rata realisasi PAD tertinggi dibandingkan kab/kota lainnya di Provinsi Jambi. Besarnya realisasi PAD yang diterima oleh pemerintah Kota Jambi dikarenakan banyaknya jumlah penduduk, banyaknya potensi pajak, dan Kota Jambi merupakan ibukota Provinsi Jambi dan menjadi pusat perekonomian di Provinsi Jambi sehingga PAD yang dapat dipungut pemerintah sangat besar. Dengan kontribusi masing-masing komponen PAD di Kota Jambi, yaitu: Pajak daerah memberikan kontribusi terbesar yaitu sekitar 67% dari total PAD atau sebesar Rp1.344,49 miliar, komponen lainnya seperti Lain-lain PAD yang sah memberikan kontribusi terbesar kedua yaitu 20% atau sebesar Rp401,71 miliar dari total PAD. Retribusi daerah memberikan kontribusi sebesar 10% atau sebesar Rp201,34 miliar dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan kontribusi terkecil yaitu sebesar 3% atau sebesar Rp50,19 miliar.

Sedangkan Kota Sungai Penuh merupakan kota yang memiliki jumlah PAD yang terendah dibandingkan daerah lainnya. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yaitu daerah ini merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Kerinci sejak tahun 2009, sehingga aset, potensi pajak, dan retribusi saat ini tidak besar dan belum optimal. Dengan kontribusi masing-masing komponen PAD di Kota Sungai Penuh, yaitu: Lain-lain PAD yang sah memberikan kontribusi terbesar yaitu sekitar 58% dari total PAD atau sebesar Rp150,62 miliar, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan kontribusi terbesar kedua yaitu 22% atau sebesar Rp56,66 miliar dari total PAD. Pajak daerah memberikan kontribusi sebesar 16% atau sebesar Rp41,4 miliar dan retribusi daerah memberikan kontribusi terkecil yaitu sebesar 4% atau sebesar Rp10,37 miliar.

**Tabel 1. 2 Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Kab/Kota di Provinsi Jambi
Tahun 2019 - 2023 (Miliar Rupiah)**

Kabupaten / Kota	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat					Rata-rata
	2019	2020	2021	2022	2023	
Batanghari	1.097,25	987	1.087,36	1.043,49	1.194,36	1.081,89
Pertumbuhan (%)		-10,05	10,17	-4,03	14,46	2,64
Bungo	1.075,20	1.008,97	977,2	1.029,71	926,99	1.003,61
Pertumbuhan (%)		-6,16	-3,15	5,37	-9,98	-3,48
Kerinci	1.089,75	1.025,72	1.018,27	1.022,92	998,69	1.031,07
Pertumbuhan (%)		-5,88	-0,73	0,46	-2,37	-2,13
Merangin	1.253,01	1.143,68	1.138,07	1.118,73	1.181,22	1.166,94
Pertumbuhan (%)		-8,73	-0,49	-1,70	5,59	-1,33
Muaro Jambi	1.175,58	1.107,56	1.151,34	1.154,12	1.029,45	1.123,61
Pertumbuhan (%)		-5,79	3,95	0,24	-10,80	-3,10
Sarolangun	1.109,89	974,57	964,13	1.047,49	908,56	1.000,93
Pertumbuhan (%)		-12,19	-1,07	8,65	-13,26	-4,47
Tjb. Barat	1.412,34	1.194,49	1.375,00	1.456,34	1.201,46	1.327,93
Pertumbuhan (%)		-15,42	15,11	5,92	-17,50	-2,97
Tjb. Timur	1.040,50	915,51	994,13	1.008,08	1.018,14	995,27
Pertumbuhan (%)		-12,01	8,59	1,40	1,00	-0,26
Tebo	947,44	891,78	950,57	999,83	877,36	933,40
Pertumbuhan (%)		-5,87	6,59	5,18	-12,25	-1,59
Kota Jambi	1.121,47	1.074,21	1.070,42	1.083,90	966,02	1.063,20
Pertumbuhan (%)		-4,21	-0,35	1,26	-10,88	-3,55
Kota Sei. Penuh	707,42	667,01	641,76	651,63	623,18	658,20
Pertumbuhan (%)		-5,71	-3,79	1,54	-4,37	-3,08

Sumber: DJPK Kemenkeu RI (Data diolah)

Berdasarkan tabel 1.2 terlihat bahwa realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat di kabupaten/kota Provinsi Jambi selama tahun 2019-2023 mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi. Pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif diseluruh kabupaten/kota akibat pandemi *covid-19* yang kemudian cenderung mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2021 dan 2022 dikarenakan upaya penanggulangan *covid* dan pemulihan ekonomi. Untuk rata-rata pertumbuhan terendah yaitu terjadi di Kabupaten Sarolangun sebesar -4,47%, hal ini dikarenakan realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat selama tahun 2019-2023 cenderung mengalami pertumbuhan yang negatif dengan pertumbuhan negatif tertinggi yaitu sebesar -13,26% pada tahun 2023. Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan

transfer pemerintah pusat tertinggi terjadi pada Kabupaten Batanghari sebesar 2,64%. Tingginya pertumbuhan tersebut dikarenakan terjadinya peningkatan realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat pada tahun 2021 dan 2023. Rata-rata realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat tertinggi terjadi pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu sebesar Rp1.327,93 miliar di setiap tahunnya. Sedangkan rata-rata realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat terendah terjadi pada Kota Sungai Penuh yaitu hanya Rp658,20 miliar di setiap tahunnya.

Selanjutnya realisasi belanja modal kab/kota di Provinsi Jambi periode 2019-2023 terlihat pada tabel 1.3 dibawah ini:

**Tabel 1. 3 Jumlah Belanja Modal Kab/Kota di Provinsi Jambi
Tahun 2019- 2023 (Miliar Rupiah)**

Kabupaten / Kota	Belanja Modal					Rata-rata
	2019	2020	2021	2022	2023	
Batanghari	251,12	150,46	177,30	276,39	460,63	263,18
Pertumbuhan (%)		-40,08	17,84	55,89	66,66	25,08
Bungo	234,63	153,99	103,30	115,34	171,43	155,74
Pertumbuhan (%)		-34,37	-32,92	11,66	48,63	-1,75
Kerinci	293,81	216,76	165,03	158,55	221,08	211,05
Pertumbuhan (%)		-26,22	-23,87	-3,93	39,44	-3,64
Merangin	226,73	274,68	342,89	73,71	172,13	218,03
Pertumbuhan (%)		21,15	24,83	-78,50	133,52	25,25
Muaro Jambi	322,19	262,78	268,24	246,15	261,59	272,19
Pertumbuhan (%)		-18,44	2,08	-8,24	6,27	-4,58
Sarolangun	414,97	247,73	158,70	184,69	179,42	237,10
Pertumbuhan (%)		-40,30	-35,94	16,38	-2,85	-15,68
Tjb. Barat	697,23	353,97	404,37	474,29	490,38	484,05
Pertumbuhan (%)		-49,23	14,24	17,29	3,39	-3,58
Tjb.Timur	328,87	229,23	229,95	290,56	314,98	278,72
Pertumbuhan (%)		-30,30	0,31	26,36	8,40	1,19
Tebo	269,09	139,86	222,21	387,53	223,96	248,53
Pertumbuhan (%)		-48,02	58,88	74,40	-42,21	10,76
Kota Jambi	432,10	444,35	495,81	368,63	455,21	439,22
Pertumbuhan (%)		2,83	11,58	-25,65	23,49	3,06
Kota Sungai Penuh	176,54	134,64	168,82	140,13	126,96	149,42
Pertumbuhan (%)		-23,73	25,39	-16,99	-9,40	-6,19

Sumber: DJPK Kemenkeu RI (Data diolah)

Penyusunan APBD perlu memperhatikan pendistribusian anggaran pada sektor- sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sesuai dengan

RPJMD lima tahunan. Penting untuk menganalisis alokasi dana pembangunan dalam APBD karena mencerminkan sistem politik pemerintah daerah. Distribusi anggaran belanja modal secara proporsional oleh pemerintah daerah bertujuan untuk mendorong sektor- sektor strategis, meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan PDRB, serta mendatangkan sumber penerimaan baru dari sektor ekonomi dan sosial (Fatimah, 2018).

Berdasarkan tabel 1.3 terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan realisasi belanja modal tertinggi di kabupaten/ kota di Provinsi Jambi selama 2019- 2023, yaitu berada di Kabupaten Merangin yaitu sebesar 25,25%. Hal ini disebabkan oleh pada tahun 2023 dengan realisasi belanja modal sebesar Rp172,13 miliar meningkat sebesar 133,25% dari tahun sebelumnya. Sedangkan Kota Sungai Penuh dengan rata-rata pertumbuhan terendah yaitu sebesar -6,19%. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan realisasi belanja modal yang cenderung mengalami pertumbuhan yang negatif di setiap tahunnya, hanya terjadi pertumbuhan positif pada tahun 2021.

Rata-rata realisasi belanja modal tertinggi berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu sebesar Rp484,05 miliar di setiap tahunnya. Besarnya belanja modal ini disebabkan oleh penerimaan pendapatan transfer pemerintah pusat yang besar juga, dimana Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki jumlah realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat tertinggi dibandingkan daerah lainnya di Provinsi Jambi. Sedangkan Kota Sungai Penuh dengan rata-rata realisasi belanja modal terendah yaitu sebesar Rp149,42 miliar di setiap tahunnya. Hal ini juga disebabkan oleh penerimaan realisasi dana perimbangan yang diterima juga kecil dibandingkan daerah lainnya. Semakin tinggi pendapatan transfer pemerintah pusat yang diberikan pemerintah pusat maka semakin tinggi pula belanja modal yang dianggarkan.

Selanjutnya realisasi belanja daerah di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2019-2023 yaitu berdasarkan tabel 1.4 dibawah ini terlihat bahwa Kota Jambi dengan realisasi belanja daerah tertinggi dengan rata-rata sebesar 1.678,64 miliar setiap tahunnya, disusul oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan rata-rata terbesar kedua yaitu sebesar 1.524,50 miliar, sedangkan rata-rata terendah berada di Kota Sungai Penuh sebesar 775,15 miliar.

**Tabel 1. 4 Jumlah Belanja Daerah Kab/Kota di Provinsi Jambi
Tahun 2019- 2023 (Miliar Rupiah)**

Kabupaten / Kota	Belanja Daerah					Rata-rata
	2019	2020	2021	2022	2023	
Batanghari	1.341,86	1.196,95	1.143,50	1.323,26	1.519,83	1.305,08
Pertumbuhan (%)		-10,80	-4,47	15,72	14,85	3,83
Bungo	1.386,88	1.294,68	1.155,17	1.218,27	1.288,73	1.268,75
Pertumbuhan (%)		-6,65	-10,78	5,46	5,78	-1,54
Kerinci	1.330,74	1.229,59	1.143,50	1.133,45	1.152,46	1.197,95
Pertumbuhan (%)		-7,60	-7,00	-0,88	1,68	-3,45
Merangin	1.448,97	1.422,30	1.495,15	1.223,92	1.284,29	1.374,93
Pertumbuhan (%)		-1,84	5,12	-18,14	4,93	-2,48
Muaro Jambi	1.425,41	1.391,58	1.326,75	1.375,28	1.242,16	1.352,24
Pertumbuhan (%)		-2,37	-4,66	3,66	-9,68	-3,26
Sarolangun	1.425,29	1.221,82	1.093,05	1.177,76	1.210,78	1.225,74
Pertumbuhan (%)		-14,28	-10,54	7,75	2,80	-3,57
Tjb. Barat	1.702,41	1.390,38	1.443,09	1.580,80	1.505,83	1.524,50
Pertumbuhan (%)		-18,33	3,79	9,54	-4,74	-2,43
Tjb.Timur	1.188,86	1.095,36	1.049,21	1.180,07	1.180,53	1.138,81
Pertumbuhan (%)		-7,86	-4,21	12,47	0,04	0,11
Tebo	1.119,84	1.021,78	1.145,76	1.338,83	1.096,75	1.144,59
Pertumbuhan (%)		-8,76	12,13	16,85	-18,08	0,54
Kota Jambi	1.661,36	1.667,72	1.740,36	1.622,85	1.700,89	1.678,64
Pertumbuhan (%)		0,38	4,36	-6,75	4,81	0,70
Kota Sungai Penuh	809,31	711,31	803,62	791,96	759,55	775,15
Pertumbuhan (%)		-12,11	12,98	-1,45	-4,09	-1,17

Sumber: DJPK Kemenkeu RI (Data diolah)

Tabel 1.4 menjelaskan bahwa Kota Jambi merupakan kota yang memiliki jumlah rata-rata realisasi belanja daerah tertinggi dibandingkan kab/kota lainnya di Provinsi Jambi yaitu sebesar Rp1.678,64 miliar di setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan Kota Jambi memiliki realisasi PAD tertinggi di Provinsi Jambi sehingga mampu membiayai belanja daerahnya, jika pendapatan daerah meningkat maka menyebabkan belanja daerah juga meningkat. Dengan kontribusi masing-masing komponen belanja daerah, yaitu: Belanja pegawai memberikan kontribusi terbesar yaitu sekitar 39% dari total belanja daerah atau sebesar Rp3.275,73 miliar, Belanja barang dan jasa memberikan kontribusi terbesar kedua yaitu 31% atau sebesar Rp2.596,14 miliar dari total belanja daerah. Belanja modal di Kota Jambi

memberikan kontribusi sebesar 26% atau sebesar Rp2.196,10 miliar dan belanja lainnya memberikan kontribusi terkecil yaitu sebesar 4% atau sebesar Rp325,22 miliar. Sedangkan Kota Sungai Penuh merupakan kota yang memiliki rata-rata realisasi belanja daerah terendah yaitu sebesar Rp775,15 miliar di setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan penerimaan realisasi PADnya juga terendah di Provinsi Jambi sehingga hanya mampu membiayai belanja sesuai prioritas. Dengan kontribusi masing-masing komponen belanja daerah, yaitu: Belanja pegawai memberikan kontribusi terbesar yaitu sekitar 39% atau sebesar Rp1.516,26 miliar, Belanja barang dan jasa memberikan kontribusi terbesar kedua yaitu 26% atau sebesar Rp1.009,62 miliar dari total belanja daerah. Belanja modal memberikan kontribusi sebesar 19% atau sebesar Rp747,09 miliar dan belanja lainnya memberikan kontribusi terkecil yaitu sebesar 16% atau sebesar Rp602,78 miliar dari total belanja daerah di Kota Sungai Penuh selama tahun 2019-2023.

APBD, sebagai kerangka keuangan tahunan yang disetujui dan ditetapkan oleh DPRD melalui peraturan daerah, memiliki peran sentral dalam mengatur alokasi dana dan pengeluaran pemerintah daerah. Ini merupakan instrumen kebijakan kunci yang tidak hanya memberikan arahan tentang bagaimana sumber daya keuangan harus dikelola, tetapi juga menetapkan prioritas pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Selain sebagai alat kebijakan, anggaran ini berada pada posisi pusat dalam mencakup kinerja keuangan, baik untuk penilaian internal dan mendukung pertumbuhan ekonomi (Syamsudin et al., 2015).

Tabel 1.5 yang disajikan di bawah memberikan gambaran yang jelas tentang fluktuasi pertumbuhan ekonomi yang terjadi di setiap kabupaten dan kota dari tahun ke tahun di Provinsi Jambi. Dari data tersebut, terlihat bahwa secara keseluruhan, rata-rata pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut menunjukkan kinerja yang memuaskan. Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang cukup mencolok dalam tingkat pertumbuhan ekonomi antara satu kabupaten atau kota dengan yang lainnya. Rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi terdapat di kabupaten Batanghari sebesar 4,98% dan terendah di kabupaten Tjb. Timur sebesar 1,54%. Pada tahun 2020 terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar -0,40 yang disebabkan oleh

wabah covid-19 yang melemahkan perekonomian global. Situasi ini memperlambat penerimaan pajak daerah dan berdampak pada daya beli masyarakat. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan sulitnya menciptakan lapangan pekerjaan.

Tabel 1. 5 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten / Kota di Provinsi Jambi Tahun 2016-2023 (persen)

Kabupaten/ Kota	Tahun								Rata-rata
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Batanghari	4,65	4,81	4,83	5,07	-0,4	4,85	12,3	3,7	4,98
Bungo	5,39	5,68	4,65	4,19	-0,5	4,99	4,73	4,66	4,22
Kerinci	6,72	5,86	4,93	4,23	3,81	3,89	4,43	5,73	4,95
Merangin	6,22	5,39	4,93	4,25	0,78	5,24	5,72	5,28	4,73
Muaro Jambi	5,49	4,95	5,01	4,79	0,35	4,06	7,97	6,28	4,86
Sarolangun	4,26	4,68	4,8	4,26	-0,3	6,61	6,73	4,02	4,38
Tanjabbar	3,14	4,48	6,77	5,01	-0,3	1,36	2,56	3,51	3,32
Tanjabtim	2,65	3,07	2,94	4,21	-3,4	0,14	0,57	2,17	1,54
Tebo	5,4	5,58	4,98	4,76	-0,03	4,3	6,3	4,5	4,47
Kota Jambi	6,84	4,68	5,3	4,73	-4,2	4,08	5,36	6,61	4,18
Kota Sei Penuh	6,51	6,02	4,88	5,01	-0,2	3,67	4,45	4,92	4,41
Rata-rata	5,21	5,02	4,91	4,59	-0,40	3,93	5,56	4,67	

Sumber: BPS Provinsi Jambi (Data diolah)

Hal ini menyoroti pentingnya adanya upaya yang terfokus pada meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah yang masih tertinggal. Dengan demikian, diharapkan bahwa pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh Provinsi Jambi dapat tercapai secara lebih merata. Upaya-upaya ini perlu didukung dengan kebijakan yang tepat dan strategi yang terukur guna memastikan bahwa potensi ekonomi di setiap wilayah dapat dimaksimalkan dan memberikan kontribusi yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Berangkat dari masalah yang dijelaskan sebelumnya penulis ingin menyelidiki kinerja keuangan pemerintah daerah terkait rasio kemandirian dan rasio keserasian belanja di setiap kabupaten atau kota di Provinsi Jambi dengan judul “**Analisis Pengaruh Rasio Kemandirian dan Rasio Keserasian Belanja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut adalah rumusan masalah penelitian ini:

- 1) Bagaimana kondisi rasio kemandirian dan rasio keserasian belanja di kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2016 – 2023?
- 2) Bagaimana *trend* rasio kemandirian dan *trend* rasio keserasian belanja kabupaten/kota di Provinsi Jambi pada periode 2024-2028?
- 3) Bagaimana pengaruh rasio kemandirian dan rasio keserasian belanja terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi periode 2016-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Studi ini bertujuan untuk menganalisis:

- 1) Rasio kemandirian dan rasio keserasian belanja kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2016 – 2023
- 2) Ekspektasi kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi pada periode 2024-2028
- 3) Pengaruh rasio kemandirian dan rasio keserasian belanja terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi periode 2016- 2023

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini bermanfaat dalam bidang ilmu ekonomi, seperti:

- 1) Manfaat Teoretis
Untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan bukti empiris tentang pengaruh rasio kemandirian dan rasio keserasian belanja terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi Jambi.
- 2) Manfaat Praktis
Sebagai syarat kelulusan pendidikan penulis dan sumber referensi tambahan terkait analisis kinerja keuangan pemerintah daerah serta membantu tercapainya keberhasilan otonomi daerah bagi pemerintah.